# BAB II TINJAUAN PUSTAKA

## Literature Review

Penelitian ini melihat beberapa penelitian terdahulu sebagai tahap awal guna melihat perbedaan penelitian ini dengan penelitian-penelitian yang telah dilakukan sebelumnya.

Penelitian pertama berjudul “*Aspects of the Name Disputes Between Macedonia and Greece: Symbols, Conflicts, and Economic Costs*” tahun terbit 2018, ditulis oleh Nenad Markovic, PhD yang merupakan seorang professor ilmu politik, Fakultas Hukum, di Cyril and Methodius University dan penulis kedua adalahseorang asisten profesor yang bernama Marjan Nikolov dari International Slavic University. (Markovic & Nikolov, 2018) Dalam penelitian tersebut menjelaskan aspek teoritis simbol dan penggunaanya dalam proses pembangunan sebuah bangsa, meneliti konflikdari latar belakangnya itu sendiri, mencoba untuk menetapkan jenis gelaja yang tepat, serta menganalisis biaya embargo ekonomi yang dikenakan kepada Republik Makedonia oleh Yunani, sebagai konsekuensi langsung dari sengketa simbolis antara kedua negara.

Konsep yang digunakan dalam untuk menjawab penelitian ini adalah *Bilateral Deterrence Theory* dan *Conflict Spiral Theory*. Teori pertama disebut ‘deterrence’ dimana aktor memiliki tingkat kemampuan daya yang sama, semakin besar kemampuan timbal balik semakin rendah kemungkinan menggunakan taktik koersif, dan kondisi kemampuan daya yang tidak setara menghasilkan lebih

11

banyak penggunaan koersif. Teori kedua yaitu *conflict spiral theory* membuat prediksi sebaliknya, kemampuan daya yang lebih besar meningkatkan penggunaan dan hubungan dengan kekuatan yang sama menghasilkan taktik yang lebih memaksa daripada yang mengandung kekuatan yang tidak setara.

Kesimpulan yang diambil penulis didalam penelitian ini yaitu bahwa penelitian ini menganalisis sengketa nama hanya sebagai penempatan simbolis dalam kelompok konflik kepemilikan.Selain itu, kedua belah pihak menunjukan balance of power, *bilateral deterrence theory* dan *conflict spiral theory* memberikan hasil yang berbeda dari tindakan lebih lanjut.Embargo yang dilakukan Yunani terhadap Makedonia berdampak serius terhadap perekonomian makedonia dan mempengaruhi kesejahteraan ekonominya.

Penelitian kedua berjudul “*Clashing Historical Narratives and The Macedonian Name Dispute — Solving the Unsolvable*” tahun terbit 2017, ditulis oleh Zhidas Daskalovski dari University of Kliment Ohridski, Skopje. (Daskalovski, 2017)

Dalam penelitian tersebut menjelaskan bagaimana Yunani memblokir keikutsertaan Republik Makedonia Bekas Yugoslavia dalam berbagai organisasi internasional seperti Uni Eropa dan NATO karena nama “Makedonia” yang dipakai oleh Republik Makedonia. Sengketa pemakaian nama “Makedonia” adalah bentrokan narasi sejarah dan hak untuk klaim asal-usul kelompok etnis dan bangsa Makedonia sekarang dan masa lalu. Dalam penelitian ini pula posisi Yunani dalam sengketa nama “Makedonia” yang memiliki pendapat bahwa Makedonia dulu,sekarang,dan akan terusmenjadi bagian dari Yunani. Presiden

Yunani, Prokopis Pavlooulos jugaberpendapat bahwa jika mereka (Republik Makedonia Bekas Yugoslavia) masih tetap mengklaim apa yang dimiliki Yunani, mereka tidak akan bergabung dengan NATO, Uni Eropa dan organisasi lain. *Statements* Yunani ini tidak pernah berubah sejak tahun 90an sampai sekarang. Menurut pemerintah Yunani, Republik Makedonia Bekas Yugoslavia tidak memiliki keterikatan sejarah dengan “Makedonia Yunani” dan “Makedonia”. Yunani menolak penuh eksistensi Republik Makedonia Bekas Yugoslavia.

Dalam penelitian ini pula menjelaskan tentang posisi Republik Makedonia Bekas Yugoslavia. Argumen Republik Makedonia yang paling sederhana adalah bahwa tidak ada dua negara yang mengklaim kebangsaan dan nama yang sama. Tidak ada ketidakjelasan antara nama sebuah negara (Republik Makedonia) dan wilayah Makedonia Yunani. Selian itu, identitas Makedonia di Yunani tidak boleh dicampur dengan identitas etno-nasional dari populasi mayoritas di Republik Makedonia.

Selain itu, dalam penelitian ini menjelaskan pula tentang opini public di kedua negara. Mayoritas warga negara Republik Makedonia Bekas Yugoslavia menolak pergantian nama selain memakainama “Makedonia”. Disisi lain, warganegara Yunani menolak pemakaian nama “Makedonia” oleh negara tetangganya tersebut.

Penelitian ini pula menjelaskan tentang solusi baru untuk kedua belah pihak. Peneliti menjelaskan bahwa untuk menyelesaikan konflik tersebut,kedua negara harus menerima dan kembali kepada sejarah Makedonia itu sendiri. Untuk Yunani, kuncinya adalah memenangkan argument atas legitimasi Makedonia kuno sebagai negara Yunani dan tidak memiliki nama “Makedonia”yang digunakan

oleh tetangganya. Untuk Republik Makedonia Bekas Yugoslavia, seluk-beluknya tentang sejarah kuno hanya berperan penting bagi pengakuan negara di bawah nama konstitusionalnya dan pemblokiran integrasi Euro-Atlantik.

Dan kesimpulan dari penelitian ini adalah meskipun Republik Makedonia memiliki sejumlah masalah dengan tetangganya, hubungan dengan Yunani sangat penting untuk stabilitas jangka panjang dan kerjasama antar negara. Meskipun ada perjanjian yang didukung oleh PBB dari tahun 1995 yakni Yunani memblokir penerimaan Republik Makedonia ke NATO dan awal negosiasi untuk masuk menjadi anggota Uni Eropa. Kegagalan untuk berintegrasi dalam organisasi- organisasiini beresiko membawa kesulitan ekonomi untuk Republik Makedonia, kemunduran demokratis, dan ketegangan antar etnis. Solusi politik dengan merundingkan nama yang tepat untuk Republik Makedonia yang disetujui kedua belah pihak kemungkinan akan menyelesaikan perselisihan panjang ini dan mampu mengikat hubungan baru bagi kedua negara tersebut.

Penelitian kediga berjudul “*The Macedonian Name Dispute: ICJ’s Decision and its Legal Approach*” diterbitkan tahun 2018, ditulis oleh Shefki Shtërbani yang merupakan seorang asisten dosen, University of Prizren, Kosovo. (Shterbani, 2018) dalam penelitian tersebut menjelaskan konflik terkait sengketa nama “Makedonia” berawal dari merdekanya Republik Makedonia dari Yugoslavia dan keikutsertaannya dalam berbagai organisasi internasional. Sikap Yunani yang menentang keras dalam pengunaan “Makedonia” ini yang mempersulit Republik Makedonia mendapatkan haknya sebagai negara untuk bergabung dengan NATO dan Uni Eropa. Penelitian ini fokus kepada putusan

Mahkamah Internasional terhadap masa depan Republik Makedonia dalam keikutsertaannya dalam organisasi Internasional.

*Interim Accord* telah ditandatangani Yunani dan Republik Makedonia, dimana antara lain Yunani tidak diperkenankan menghalangi proses integrasi Republik Makedonia berdasarkan perjanjian internasional tersbut. Dikarenakan Yunani telah melanggar perarturan yang telah dibuat dan ditandatangani kedua belah pihak, Republik Makedonia membawa kasus ini ke Mahkamah Internasional. Masalah-masalah yang ditangani berkaitan dengan peninjauan atas pelanggaran perjanjian dan konsekuensinya. Fokus utamanya adalah analisis keputusan Mahkamah Internasional tentang pelanggaran kesepakatan sementara oleh Yunani.

Dalam penelitian ini pula menjelaskan dari perspektif sejarah bagaimana konflik ini bisa terbentuk, lalu bagaimana terbentuknya Republik Makedonia yang terbentuk saatini dengan nama sementaranya yakni Republik Makedonia Bekas Yugoslavia. Dalam penelitian ini juga disebutkan bagaimana *Interim Accord* dibentuk di New York City, Amerika Serikat. Perjanjian ini dimaksudkan untuk meredam konflik antara Yunani dan Republik Makedonia serta usaha pertama bagi kedua negara yang rumit melalui hukum internasional.

Dijelaskan juga tentang bagaimana Yunani mengancamakan memveto undangan keanggotaan Republik Makedonia Bekas Yugoslavia dalam puncak pertemuan NATO di Bucharest, Rumania. Pemerintah Yunani berargumen bahwa penggunaan nama “Makedonia” oleh Republik Makedonia Bekas Yugoslavia memungkinkan klaim teritori bagian wilayah Makedonia di Yunani. Oleh karena

itu, dalam pernyataan bersama pada akhir KTT NATO di Bucharest, menyatakan bahwa tidak ada penawaran keanggotaan bagi Republik Makedonia Bekas Yugoslavia sampai perselisihan nama “Makedonia” terselesaikan.

Jurnal inipun menjelaskan tentang *judgement* atau putusan Mahkamah Internasional mengenai konflik perselisihan nama “Makedonia” dan bagaimana dampak dari putusan Mahkamah Internasional serta efek yang ditimbulkan. Lalu perkembangan terkini dan masa depan Republik Makedonia dan proses integrasinya kedalam NATO dan Uni Eropa, karena konflik ini terus bergejolak semenjak merdekanya Republik Makedonia dan konfliknya masih berlanjut sampai saat ini.

Kesimpulan yang ditulis penulis dalam karya ilmiah ini adalah Republik Makedonia diakui oleh PBB dengan nama *the Former Yugoslav Republic of Macedonia* atau singkatannya FYROM, sampai kebijakan dan kesepakatan bersama mengenai nama untuk Republik Makedonia antara Yunani dan Republik Makedonia dibuat. Situasi hubungan kedua negara mulai cukup membaik ketika *Interim Accord* dibuat pada tahun 1995 di New York City yang mana Yunani mengakui Republik Makedonia dengan nama sementara yakni FYROM “the Former Yugoslav Republic of Macedonia” dan menyepakati bahwa Makedonia tidak dapat dicegah dalam integrasinya ke dalam organisasi Internasional. Solusi terbaik bagi kedua negara adalah kompromi dari kedua belah pihak yang mana hanya bisa dicapai melalui kemauan politik kedua negara. Mencapai kesepakatan akhir tentang masalah nama “Makedonia” akan menciptakan masa depan yang

lebih stabil sebagai negara bertetangga dan membuka prospek keanggotaan Republi Makedonia bekas Yugoslavia untuk NATO dan Uni Eropa.

# Tabel 2.1 Perbandingan Ulasan Literatur (Literature Review)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **No.** |  | | **Persamaan** | **Perbedaan** |
| 1 | **Judul Penelitian** | *Aspects of the Name Disputes Between Macedonia and Greece: Symbols, Conflicts, and Economic Costs* | Menjelaskan asal-muasal perselisihan terkait perselisihan nama “Makedonia” dari perspektif sejarah | Teori yang digunakan sebagai kerangka dasar adalah *Bilateral Deterrence Theory* dan *Conflict Spiral Theory* |
| **Penulis** | Nenad Markovic, PhD dan Marjan Nikolov |
| **Tahun** | 2018 |
| 2 | **Judul Penelitian** | *Clashing Historical Narratives and The Macedonian Name Dispute — Solving the Unsolvable* | Menggunakan perspektif sejarah sebagai dasar acuan penyelesaian masalah | Memuat Opini publik dan  solusi baru terkait perselisihan nama “Makedonia” |
| **Penulis** | Zhidas Daskalovski |
| **Tahun** | 2017 |
| 3 | **Judul Penelitian** | *The Macedonian Name Dispute: ICJ’s Decision and its Legal Approach* | Membahas putusan *International Court of Justice* | Tingkat analisis |
| **Penulis** | Shefki Shtërbani |
| **Tahun** | 2018 |

1. **Kerangka Teoritis/Konseptual**

Teori, konsep dan pernyataan dari para ahli atau pakar maupum otoritas tertentu yang mempunyai wewenang dan pemahaman yang komprehensif terhadap permasalahan ataupun fenomena yang terjadi dapat dijadikan sebagai alasan dalam pengkajian permasalahan yang sedang penulis kaji. Kerangka

teoritis adalah sumber dan landasan untuk menganalisa permasalahan yang akan diteliti.

Untuk memahami permasalahan yang dipaparkan, setiap peneliti harus memahami konsep dari beberapa teori yang berkorelasi dengan objek yang dengan tema yang diangkat. Berikut adalah teori-teori yang berkaitan:

# Hubungan Internasional

Hubungan internasional dapat diartikan sebagai studi hubungan dan sebuah interaksi antar negara-negara yang termasuk aktivitas dan kebijakan pemerintah dari organisasi internasional, organisasi non-pemerintah, dan *multinational corporation* atau perusahaan multinasional. Alasan untuk mempelajari ilmu hubungan internasional adalah fakta bahwa hamper seluruh penduduk di dunia terbagi ke dalam wilayah politik yang terpisah-pisah atau negara-negara yang merdeka yang cukup memengaruhi bagaimana cara hidup seorang insan. Negara-negara tersebut secara langsung membentuk sistem antar bangsa yang pada akhirnya menjadi sistem dunia. (Jackson & Sorensen, 2013)

Adapun beberapa definisi mengenai Hubungan Internasional seperti menurut K.J. Holsti sebagai berikut:

# “Hubungan Internasional akan berkaitan erat dengan segala bentuk interaksi diantara masyarakat negara-negara baik yang dilakukan oleh pemerintah atau warga negara, pengkajian Hubungan Internasional termasuk pengkajian terhadap politik luar negeri atau politik internasional, dan meliputi segala segi hubungan diantara berbagai negara di dunia meliputi kajian terhadap lembaga perdagangan internasional, pariwisata, transportasi, komunikasi, dan perkembangan nilai-nilai dan etika internasional.” (Holsti, 1987)

Masih berhubungan dengan istilah hubungan internasional, adapun istilah hubungan internasional menurut Coloumbusdan Wolfe dalam bukunya yang berjudul “*Introduction to International Relations: Power and Justice*” sebagai berikut:

# “Hubungan Internasional merupakan hubungan yang terjalin antar negara-negara diseluruh belahan dunia. Dimana di dalam Hubungan Internasional sendiri terdapat komponen- komponen yang mempengaruhi kerja dari Hubungan Internasional sendiri yakni adanya analisis mengenai perbandingan politik Luar Negeri ssuatu negara, Hukum Internasional, organisasi-organisasi internasional, perbandingan politik dan studi kawasan (*area studies*), studi- studi strategis (*strategic studies*), pembangunan nasional, komunikasi internasional, dan studi perdamaian serta upaya penyelesaian konflik termasuk menyangkut pengendalian dan pelucutan senjata.” (Coloumbus & Wolfie, 1978)

Hubungan Internasional pada intinya adalah hal-hal yang berkaitan mengenai interaksi antara negara-anggota masyarakat atau kesatuan yang terpisah. Sebagian besar dari transaksi dan interaksi antar negara didalam sistem internasional sekarang bersifat rutin dan nyaris berbasis bagi publik. Berbagai jenis permasalahan nasional, regional, dan global telah bermunculan dan menjadi sebuah perhatian bagi berbagai negara, sehingga segala yang terjadi di satu negara di dunia pasti akan mempengaruhi negara dibagian dunia yang lainnya.

Dari sinilah negara-negara di dunia membuat strategi agar mendapatkan dan mencapai tujuannya masing-masing. Berkaitan dengan penelitian yang dibahas, dikawasan Balkan atau Eropa bagian selatan terdapat pula negara-negara yang kaya akan sejarah, dan mereka menganggap sejarah adalah bagian terpenting dari sebuah negara dan tidak bisa di ganggu gugat serta di klaim begitu saja.

Hubungan antar negara pada era ini sangatlah penting, dengan adanya sebuah hubungan antar negara jika bisa menjalinya dengan baik maka bisa menciptakan kerukunan. Dengan adanya hubungan antara negara satu dengan negara lain dapat membantu pemenuhan kebutuhan dalam negeri serta dapat ikut serta dalam tatan dunia antarbangsa. Setiap negara memiliki kepentingan nasionalnya masing-masing dalam melaksanakan pemenuhan kebutuhan dalam negeri serta rakyatnya. Benturan atau sebuah sengketa biasa sering terjadi, apalagi sengketa dengan negara tetangga. Pengertian sengketa itu sendiri menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia ialah suatu hal yang menyebabkan perbedaan pendapat; pertengkaran; dan perbantahan. (KBBI, 2019) Perbedaan ideologi, kepentingan juga penafsiran dapat memicu terjadinya sebuah sengketa. Dalam hal ini sengketa nama “Makedonia” yang melibatkan dua negara yakni Yunani dan Republik Makedonia dengan nama sementaranya Republik Makedonia Bekas Yugoslavia dapat terjadi, dikarenakan perbedaan kepentingan nasional diantara kedua negara tentang penggunaan istilah “Makedonia”. Pengertian kepentingan nasional itu sendiri menurut Jack Plano dan Roy Olton dalam buku terjemahan kamus Hubungan Internasional yang ditulis oleh Putra A. Bardin mengatakan bahwa:

# “Tujuan mendasar serta faktor yang sangat menentukan yang memandu para pembuat keputusan dalam merumuskan politik luar negeri itu adalah kepentingan nasional. Kepentingan nasional merupakan konsepsi yang sangat umum tetapi merupakan unsur yang menjadi kebutuhan yang sangat vital bagi negara, kemerdekaan,keutuhan wilayah, keamanan militer, dan kesejahteraan nasional” (Plano & Olton, 1999)

Sejarah merupakan suatu hal yang sangat penting, tidak terkecuali bagi Yunani, mereka sangat menghargai sejarah mereka yang sangat kaya. Yunani

adalah sebuah negara yang terletak di Laut Mediterrania, negara ini dikenal sebagai negara yang kaya akan sejarah bagi peradaban dunia.Yunani dianggap sebagai tempat lahirnya peradaban barat, menjadi tempat kelahiran demokrasi, filsafat barat, sastra barat, historiografi, ilmu politik, prinsip ilmiah dan prinsip matematika drama barat dan olimpiade serta pemimpin kekaisaran yang terkuat didunia yakni Alexander Agung dari kekaisaran Makedonia.Maka dari itu, Yunani sangatlah menjaga sejarah serta peninggalannya.

Kemunculan Republik Makedonia pada awal tahun 90an menjadi ancaman bagi Yunani karena menganggap Republik Makedonia telah memakai nama “Makedonia” yang menurut Yunani istilah tersebut milik mereka jikamelihat dari perpektif sejarah. Mereka menganggap pemakaian istilah “Makedonia” hanya boleh dipakai oleh Yunani dan istilah tersebut adalah bagian dari Yunani.Sedangkan argumen sederhana dari Republik Makedonia adalah bahwa tidak ada dua negara yang mengklaim kebangsaan dan nama yang sama. Tidak ada kebingungan antara nama sebuah negara (Republik Makedonia) dan nama wilayah (Makedonia Yunani). Selain itu, identitas Makedonia regional di Yunani tidak boleh dicampur dengan identitas etno-nasional dari Republik Makedonia. Orang yang memiliki identitas regional sebagai ‘orang Makedonia’ pula dapat ditemukan di Bulgaria. Argumen lain dalam membela hak Makedonia untuk menggunakan namanya adalah hal untuk menentukan nasib sendiri adalah prinsip, sering dilihat sebagai hak moral dan hukum, bahwa semua orang berhak menentukan status politik mereka dan secara bebas mengejar perkembangan ekonomi, sosial dan budaya. (Daskalovski, 2017)

# Hukum Internasional

Pengertian Hukum Internanasional sendiri menurut J.G. Starke dalam buku yang berjudul Pengantar Hukum Internasional yang ditulis terjemahkan oleh I Wayan Parthiana mengatakan:

# “Hukum Internasional dapat didefinisikan sebagai kumpulan hukum yang sebagian besar terdiri atas prinsip-prinsip danperaturan-peraturan yang mengatur tentang perilakuyang harus ditaati oleh negara-negara, dan oleh karena itu juga harus ditaati dalam hubungan-hubungan antara mereka satu dengan lainnya.” (Parthiana, 2003)

Dalam masyarakat internasional dikenal dengan prinsip penyelesaian konflik secara damai yang mana hal ini dituangkan dalam pasal 1 Konvensi Den Haag Tahun 1907. Pada pasal 1 tersebut kemudian dianbil alih oleh Piagam PBB yakni dalam Pasal 2 ayat 3 Piagam Peserikatan Bangsa-Bangsa yang berbunyi:

***“All members shall settle their international disputes by peaceful means in such a manner that international peace and security and justice, are not endangered.”* (Semua anggota harus menyelesaikan persengketaan internasional dengan jalan damai sedemikian rupa sehingga perdamaian dan keamanan internasional, dan keadilan, tidak terancam).**

Ketentuan Pasal diatas ini kemudian dijelaskan kembali dalam Pasal 33 Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa. Prinsip-prinsip penyelesaian perdamaian secara damai lalu diambil alih pada deklarasi tentang hubungan persahabatan kerja sama antar negara pada tanggal 14 Oktober 1970 dan duabelas tahun kemudian pada deklarasi Manila pada tanggal 15 Nopember 1982 tentang sengketa internasional secara damai.

Dalam studi hukum internasional, terdapat dua macam sengketa internasional, yakni:

* 1. Sengketa Politik

Sengketa politik merupakan sengketa ketika sebuah negara mendasarkan tuntutan tidakberdasarkan pertimbangan yurisdiksi melainkan dengan dasar politik atau kepentingan lainnya, sengketa jenis ini dapat diselesaikan secara politik.Pertimbangan atau keputusan yang diambil dalam penyelesaian konflik hanya berbentuk usulan yang tak mengikat pada negara yang bersengketa.Usulan tersebut mengedepankan dan mengutamakan negara yang bersengketa dan tak harus mendasarkan pada sebuah ketentuan yang diambilnya.

* 1. Sengketa hukum

Sengketa hukum merupakan sebuah sengketa dimana sebuah negara mendasarkan sengketa yang dituntutnya atas ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam sebuah perjanjian atau yang sudah diakui oleh hukum internasional. Pertimbangan dan keputusan yang akan diambil dalam penyelesaian sengketa sifatnya memaksa secara hukum terhadap kedaulatan negara-negara yang berselisih. Hal tersebut dikarenakan keputusan yang diambil hanya berdasarkan pada prinsip-prinsip hukum internasional.(Boer, 2005)

Metode-metode dalam penyelesaian sengketa dikategorikan dalam 2 jenis, yakni:

1. Cara penyelesaian damai apabila negara-negara yang bersengketa mampu menyepakati untuk membuat solusi yang baik. Metode-metode penyelesaian sengketa internasional secara bersahabat atau secara damai dalam klasifikasi sebagai berikut:
   1. *Arbitration* (Arbitrasi)
   2. *Judicial Settlement* (Penyelesaian Yudisial
   3. *Good Office* (Negosiasi, Jasa-jasa baik, mediasi, konsiliasi)
   4. *Inquiry* (Penyelidikan)
   5. Penyelesaian dibawah naungan organisasi PBB
2. Cara penyeselsaian sengketa internasional dengan kekerasan, yakni apabila sebuah solusi yang dipakai atau dipakai adalah melalui kekerasan.
   1. *Restorsion*(Restorsi)
   2. *Reprisals* (Tindakan Pembalasan)
   3. *Pacific Blockade* (Blokade secara damai)
   4. *Intervention* (Intervensi)
   5. *War and non-war armed action* (Perang dan tindakan bersenjata bukan perang)

# Sengketa Internasional

Menurut Mahkamah Internasional, sengketa internasional yaitu suatu keadaan ketika dua negara yang memiliki pandangan yang berbeda atau bertentangan mengenai dilaksanakan atau tidaknya kewajiban-kewajiban yang terdapat dalam sebuah perjanjian. Sengketa internasional dapat terjadi apabila perselisihannya melibatkan lembaga *jusristic person* (badan hukum) atau individu dalam bagian dunia yang lainnya terjadi karena kesalahpahaman suatu hal, salah satu pihak tersebut sengaja melanggar kepentingan atau hak negara lain, dua negara berselisih pemahaman, pendirian tentang suatu hal juga pelanggaran hukum ataupun perjanjian internasional.

Pengertian *International dispute* atau sengketa internasional menurut Huala Adolf S.H., L.L.M., Ph.D. dalam buku yang ditulisnya yang berjudul hukum penyelesaian sengketa internasional mengatakan bahwa:

# “Sengketa internasional adalah suatu situasi ketika dua Negara mempunyai dua pandangan yang bertentangan mengenai dilaksanakan atau tidaknya kewajiban-kewajiban yang terdapat dalam perjanjian.” (Huala, 2004)

* **Resolusi Konflik Internasional**

Resulusi konflik menjadi suatu kerangka kerja dalam penyelesaian konflik, ada tiga unsur penting dalam resolusi konflik menurut Peter Wallensten, yakni:

1. Adanya sebuah kesepakatan yang biasanya dituangkan dalam sebuah dokumen rahasia yang disepakati dan ditandatangani dan menjadi pegangan berikutnya bagi seluruh pihak.
2. Setiap pihak menerima atau mengakui eksistensi dari pihak lain sebagai subjek.
3. Pihak-pihak yang bertikai juga sepakat untuk menghentikan segala aksi kekerasan agar proses pembangunan rasa saling percaya dapat berjalan sebagai landasan untuk bertransformasi ekonomi, sosial, dan politik yang didambakan. (Hermawan, 2007)

Lebih lanjut lagi berkaitan dengan resolusi konflik, banyak yang bergantung pada mekanisme penyelesaian konflik. Pada konteks studi hubungan internasional, menurut Oliver Ramsbotham, Tom Voodhouse dan Hugh Miall terdapat beberapa sifat dan resolusi konflik, yaitu:

* 1. *Multilevel*, resolusi konflik harus menyertakan semua tingkatan konflik, yaitu konflik antar-individu, antar-kelomppok, antar aktor internasional, regional dan nasional.
  2. Multidiciplinary, adalah resolusi konflik yang pada dasarnyamenyertakan beberapa ilmu termasuk ilmu politik, hubungan internasional, pembahasan mengenai strategi pendekatan dan penyelesaian konflik, hingga ilmu psikologi. Hal tersebut disebabkan konflik merupakan suatu masalah multi-dimensional yang melibatkan banyak ilmu.
  3. *Multicultural*, konflik antar manusia adalah fenomena yang mendunia dan menggambarkan peningkatan hubungan budaya lokal/global maka dibutuhkan usaha yang bersifat kooperatif antar negara untuk menyelesaikan konflik yang berdampak baik secara langsung maupun tidak langsung kepada Negara yang terletak secara geografis disekitar negara yang berkonflik.
  4. *Both analytic and normative*, adalah suatu analisis dalam hal mentransformasikan suatu keadaan yang menggambarkan kekerasan yangmenuju keadaan yang lebih aman. Transformasi yang dimaksudkan disini ialah transformasi politik dan sosial.
  5. *Both theoretical and practical*, resolusi konflik sebaiknya adalah gabungan antara teori yang dibahas dandapat diimplementasikan. (Miall, 2002)

Resolusi konflik dibagi menjadi tiga tahapan menurut Galtung diantaranya

*peace making*, *peace keeping*, serta *peace building*.

* + 1. *Peace making* merupakan suatu strategi upaya dalam mengakhiri suatu kekerasan penyebab konflik dengan cara membangun suatu jembatan komunikasi antara pihak yang berselisih, contohnya suatu perjanjian tertulis yang melibatkan mediator.
    2. *Peace keeping* merupakan proses penjagaan keamanan dengan pengakuan masing-masing pihak terhadap sebuah perjanjian dan selalu berusaha untuk menjaganya sebagai suatu perisai dalam penyelesaian konflik yang terjadi berikutnya.
    3. *Peace building* merupakan proses pengimplementasian perubahan atau rekonstruksi sosial, ekonomi ataupun politik demi mencapai sebuah *sustainable peace*.

Dari ketiga tahapan resolusi konflik diatas, diharapkan terciptanya transformasi *negative peace* (*the absence of war*) menjadi *positive peace* dimana semua lapisan masyarakat akan mendapatkan sebuah keadilan sosial, kesetaraan dan kesejahteraan ekonomi. (Jemadu, 2008)

# Teori Neorealisme

Teori neorealisme juga sering disebut sebagai *structural realism* atau neorealisme struktural. Tokoh dan sekaligus pemimpin pemikiran ini yang adalah Kenneth Waltz. Pada penghujung tahun 1979, karyanya Waltz yang berjudul *Theory of International Politics* adalah sebuah produk terbaik tentang pemikiran neorealisme yang didasarkan atas asumsi-asumsi rasionalis. Tokoh Hubungan Internasional lainnya yang dapat digolongkan sebagai kaum neorealis adalah Martin Hollis, Barry Buzan, Glenn Snyder, serta Steve Smith.

Kenneth Waltz sebagai pionir neorealisme berusaha menempatkan teori realis satu langkah lebih maju dengan menegaskan bahwa “hukum-hukum” umum yang dapat diidentifikasikan untuk menjabarkan peristiwa-peristiwa dalam sistem internasional. Neorealis berasumsi bahwa *power* dalam sistem internasional sangatlah bervariasi juga bahwa negara-negara akan berusaha menyeimbangkan distribusi kekuatan tersebut.

Esensi dari neorealisme atau realisme struktural adalah konsentrasinya pada struktur dari sistem internasional. Seperti yang dikemukakan oleh Waltz, struktur dari sistem dan ragam yang ada di dalamnya memengaruhi interaksi unit- unit serta hasil yang mereka produksi.

Neorealisme Kenneth Waltz mempunyai tiga lapisan faktor eksplanan yang memiliki kontribusi untuk menjelaskan perilaku sebuah negara, yakni:

1. Anarki atau sistem penyelamatan diri (*self-help system*)
2. Diferensiasi fungsional dari unit-unit; serta
3. Perubahan distribusi kapabilitas *power* (perubahan konfigurasi polaritas).

Beberapa pemikir neorealisme mencoba memberikan penekanan yang berlainan atau berusaha untuk sedikit berbeda dengan Kenneth Waltz. Seperti misalnya Barry Buzan yang berupaya menyusun kembali neorealisme dengan cara memperkenalkan variabel tambahan untuk menjelaskan perilaku negara atau sebuah peristiwa dalam sistem internasional, yakni variabel proses dan kapasitas interaksi. Selain Barry Buzan, Glenn Snyder mencoba membentuk sebuah teori spesifik perihal aliansi yang didasarkan pada landasan pemikiran neorealis.

Kemudian Martin Hollis dan Steve Smith berupaya untuk membuat isu-isu kunci tentang epistemologi dan ontologi sebagai dari teori neorealism.

Pada intinya, neorealisme tidak dimaksudkan sebagai sebuah teori politik luar negeri, melainkan sebagai teori sistemik yang ditujukan untuk menjelaskan *state behavior* atau perilaku negara. Dengan kata lain, teori neorealisme ini menjelaskan perihal jenis-jenis berbeda dari perilaku negara, seperti teori *balancing*, teori *bandwagoning*, serta teori *relative gains* atau *absolute gains*. Neorealisme selalu menjelaskan dengan menggunakan faktor-faktor struktural sistemik tidak masalah apa pun perilakunya, seperti misalnya dengan pendekatan polaritas, teori *balance of power* dan lainnya. Hal-hal tersebutlah yang menyebabkan neorealisme sering juga disebut sebagai realisme struktural.

***Tinjauan umum mengenai Mahkamah Internasional (*International Court of Justice)***

# Pengertian Mahkamah Internasional

Mahkamah Internasional atau dalam bahasa Inggrisnya ialah *International Court of Justice* atau biasa disingkat ICJ ini adalah sebuah badan pengadilan internasional resmi yang bersifat tetap dan bertugas untuk memeriksa dan memutus perkara-perkara yang diajukan kepada Mahkamah Internasional. Mahkamah Internasional terdiri dari 15 hakim yang dipilih oleh Majelis Umum yang berdasarkan kecakapan atau kemampuan mereka, bukan berdasarkan kewarganegaraan mereka. Mahkamah Internasional bermarkas di Den Haag, Belanda. Bahasa Resmi yang digunakan dalam Mahkamah Internasional adalah Bahasa Inggris dan Bahasa Prancis.

Mahkamah Internasional merupakan organ utama dari lembaga kehakiman Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Mahkamah Internasional didirikan pada tahun 1945 berdasarkan *Charter of the United Nations* atau Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa. Mahkamah Internasional ini mulai berfingsi pada tahun 1946 sebagai pengganti *Permanent Court of International Justice* atau dalam bahasa Indonesia ialah Mahkamah Internasional Permanen. Sebagaimana yang tercantum pada Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa bahwa Mahkamah Internasional adalah salah satu bagian organ utama dari PBB bersama dengan Majelis Umum, Dewan Keamanan, Dewan Ekonomi dan Sosial, Dewan Perwalian, serta Sekretariat.

# Komposisi Mahkamah Internasional

Dalam Pasal 9 Statuta Mahkamah Internasional dijelaskan bahwa komposisi Mahkamah Internasional terdiri dari 15 hakim dengan masa jabatan 9 tahun. Ke-15 calon hakim tersebut diseleksi dari warga negara anggota yang dinilai cakap dalam bidang hukum internasional. Dari daftar calon hakim tersebut, Dewan Keamanan PBB dan Majelis Umum secara independen melakukan suatu pemungutan suara untuk memilih anggota Mahkamah Internasional.

Calon-calon hakim Mahkamah Internasional yang mendapatkan suara terbanyak terpilih menjadi hakim Mahkamah Internasional. Biasanya lima hakim Mahkamah Internasional berasal dari negara anggota tetap Dewan Keamanan PBB seperti Amerika Serikat, Inggris, Prancis, Tiongkok, dan Russia. Selain 15 hakim tetap, Pasal 32 Statuta Mahkamah Internasional memungkinkan dibentuknya hakim *ad hoc* yang mana terdiri dari dua orang hakim yang direkomendasikan oleh negara yang bersengket. Kedua hakim *ad hoc* tersebut

bersama-sama dengan ke-15 hakim tetap memeriksa serta memutuskan perkara yang disidangkan.

# Fungsi Mahkamah Internasional

Fungsi utama dari Mahkamah Internasional adalah menyelesaikan kasus- kasus persengketaan internasional yang terjadi yang subjeknya adalah negara. Di dalam Pasal 32 Statuta Mahkamah Internasional dinyatakan bahwa yang dapat beracara di Mahkamah Internasional di Mahkamah Internasional adalah subjek hukum negara. Ada tiga kategori negara menurut statuta tersebut, yakni sebagai berikut:

* 1. Negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa berdasarkan Pasal 35 Ayat 1 Statuta Mahkamah Internasional dan Pasal 93 Ayat 1 Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa, otomatis memiliki hak untuk beracara di Mahkamah Internasional
  2. Negara bukan anggota PBB yangmenjadi anggota statuta Mahkamah Internasional dapat beracara di Mahkamah Internasional jika sudah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Dewan Keamanan PBB atas dasar pertimbangan Majelis Umum PBB yaitu bersedia menerima ketentuan dari statuta Mahkamah Internasional piagam PBB Pasal 94 dan segala ketentuan yang berkenaan dengan Mahkamah Internasional.
  3. Negara bukan anggota statuta Mahkamah Internasional, kategori- kategori ini diharuskanmembuat deklarasi bahwa akantunduk pada ketentuan Mahkamah Internasional dan Piagam PBB Pasal 94.

# Tugas Mahkamah Internasional

Mahkamah Internasional mempunyai tugas-tugasnya sebagai berikut:

* Bertugas untuk memeriksa suatu sengketa atau perselisihan antara negara-negara anggota PBB yang diserahkan kepada Mahkamah Internasional.
* Bertugas untuk memberi pendapat kepada Majelis Umum PBB perihal penyelesaian sengketa antara negara-negara anggota PBB.
* Bertugas untuk mengajukan kepada Dewan Keamanan PBB untuk bertindak terhadap salah satu pihak yang tidak melaksanakan keputusan dari Mahkamah Internasional.
* Bertugas untuk memberi nasihat persoalan hukum kepada Dewan Keamanan dan Majelis Umum PBB.

# Yurisdiksi Mahkamah Internasional

Yurikdiksi atau kewenangan yang dimiliki oleh Mahkamah Pidana Internasional untuk menegakkan aturan hukum internasional yakni memutus perkara terbatas terhadap pelaku kejahatan berat oleh warga negara dari negara yang sudah meratifikasi statuta mahkamah.

Pasal 5 – 8 statuta mahkamah menentukan empat jenis kejahatan berat, yakni sebagai berikut:

* 1. ***The Crime of Genocide* (Kejahatan Genosida),** yakni suatu tindakan kejahatan yang berupaya untuk memberantas atau memusnahkan secara menyeluruh atau sebagian dari suatu ras, etnik, bangsa atau kelompok keagamaan tertentu.
  2. ***The Crime Against Humanity* (Kejahatan terhadap Manusia),** yaitu suatu tindakan penyerangan yang sistematis atau luas terhadap populasi penduduk sipil tertentu.
  3. ***The War Crime* (Kejahatan Perang)**, yaitu kejahatan yang meliputi beberapa hal sebagai berikut:
     + Tindakan yang berkenaan dengan kejahatan perang, khususnya jika dilakukan sebagai bagian dari suatu kebijakan, rencana atau pelaksanaan secara besar-besaran dari tindakan kejahatan tersebut.
     + Semua tindakan terhadap manusia ataupun pada hak milikmya yang berlawanan dengan Konvensi Jenewa seperti halnya pembunuhan berencana, eksperimen biologis, penyiksaan, menghancurkan harta benda, dan lainnya.
     + Kejahatan serius yang melanggar hukum konflik bersenjata internasional. Seperti halnya membombardir secara membabi buta suatu desa atau penghuni bangunan-bangungan tertentu yang bukan objek militer, menyerang objek-objek sipil yang bukan objek militer, dan lainnya.
  4. ***The Crime of Aggression* (Kejahatan Agresi)**, yaitu suatu tindak kejahatan yang berkenaan dengan ancaman terhadap perdamaian. (“Mahkamah Internasional: Pengertian, Komposisi, Fungsi, dan Tugas, serta Kewenangan Lengkap,” 2019)

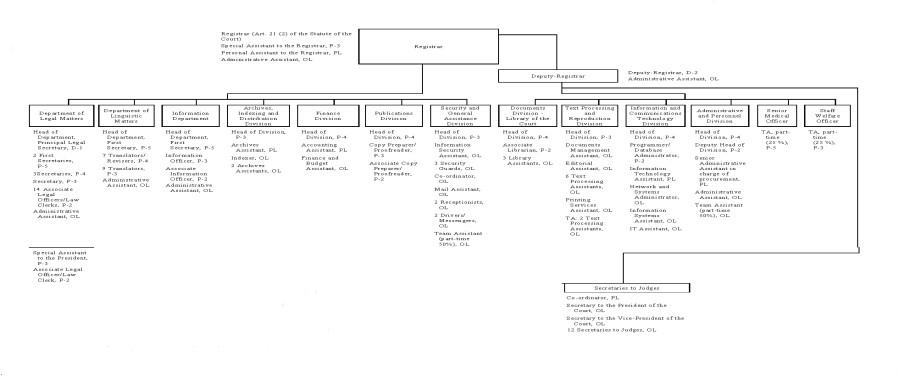
# Struktur Mahkamah Internasional

Secara keseluruhan, struktur organisasional Mahkamah Internasional terdiri dari:

* 1. *Registrar*
     + *Department of Legal Matter*
     + *Department of Linguistic Matters*
     + *Information Department*
     + *Archives, Indexing, and Distribution Division*
     + *Finance Division*
     + *Publications Division*
     + *Security and General Assistance Division*
       - *Deputy-Registrar*

o *Secretary Judges*

* + - *Documents Division – Library of the Court*
    - *Text Processing and Division*
    - *Information and Communications Technology Division*
    - *Administrative and Personnel Division*
    - *Senior Medical Officer*
    - *Staff Welfare Officer*



Sumber: <https://www.icj-cij.org/en/organizational-chart>

Per tahun 2018, Presiden-Presiden yang telah dan salah satu yang masih menjabat sebagai Presiden Mahkamah Internasional ialah sebagai berikut:

# Tabel 2.2 Presiden-Presiden Mahkamah Internasional

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| No. | Presiden | Mulai Jabatan | Akhir Jabatan | Negara |
| 1 | José Gustavo Guerrero | 1946 | 1949 | El Salvador |
| 2 | Jules Besdevant | 1949 | 1952 | Prancis |
| 3 | Arnold McNair | 1952 | 1955 | Britania Raya |
| 4 | Green Hackworth | 1955 | 1958 | Amerika Serikat |
| 5 | Halge Klӕstad | 1958 | 1961 | Norwegia |
| 6 | Bohdan Winiarski | 1961 | 1964 | Polandia |
| 7 | Percy Spender | 1964 | 1967 | Australia |
| 8 | José Bustamante y Rivero | 1967 | 1970 | Peru |
| 9 | Muhammad Zafarullah Khan | 1970 | 1973 | Pakistan |
| 10 | Manfred Lachs | 1973 | 1976 | Polandia |
| 11 | Eduardo Jimenés de Aréchaga | 1976 | 1979 | Uruguay |
| 12 | Humprey Waldock | 1979 | 1981 | Britania Raya |
| 13 | Taslim Elias | 1981 | 1985 | Nigeria |
| 14 | Nagendra Singh | 1985 | 1988 | India |
| 15 | José Ruda | 1988 | 1991 | Argentina |
| 16 | Robert Jennings | 1991 | 1994 | Britania Raya |
| 17 | Mohammed Bedjaoui | 1994 | 1997 | Aljazair |
| 18 | Stephen Schwebel | 1997 | 2000 | Amerika Serikat |
| 19 | Gilbert Guillaume | 2000 | 2003 | Prancis |
| 20 | Shi Jiuyong | 2003 | 2006 | Tiongkok |
| 21 | Rosalyn Higgins | 2006 | 2009 | Inggris |
| 22 | Hisashi Owada | 2009 | 2012 | Jepang |
| 23 | Peter Tomka | 2012 | 2015 | Slovakia |
| 24 | Ronny Abraham | 2015 | 2018 | Prancis |
| 25 | Abdulqawi Yusuf | 2018 | 2020 | Somalia |

1. **Hipotesis**

Berdasarkan kerangkateoritis dan permasalahan yang telah dipaparkan di atas, maka penulis mencoba membuat dan memutuskan hipotesis sebagai berikut:

# “Jika putusan Mahkamah Internasional tentang sengketa Republik Makedonia dan Yunani diimplementasikan, maka perselisihan antara Yunani dan Republik Makedonia dapat diredam.”

1. **Verifikasi Variabel dan Indikator (Konsep teoritik, empiric, dan analisis)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Variabel dalam Hipotesis**  **(Teoritik)** | **Indikator (Empirik)** | **Verifikasi (Analisis)** |
| Variabel bebas:  Melalui putusan Mahkamah Internasional melalui *Application of the Interim Accord of 13 September 1995 (The Former Yugoslav* | 1. Adanya  pelanggaran yang di lakukan oleh Yunani dalam perjanjian *Interim Accord* | 1. Yunani telah melanggar pasal  11 ayat 1*Interim Accord of 13 september 1995* dengan menolak keikutsertaan Republik Makedonia ke dalam organisasi NATO menjelang KTT Bucharest 2008.  (www.icj-cij.com) |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| *Republik of Macedonia v. Greece)* | 2. Adanya putusan bahwa Republik Makedonia dapat terus menggunakan nama konstitusionalnya. | 2. Yunani  menghalangi keanggotaan Republik Makedonia atau organisasi internasional lainnya atas dasar “niat Makedonia untuk menggunakan nama konstitusionalnya ”.  (www.icj-cij.com) |
| Variabel Terkait:  Maka perselisihan antara Yunani dan Republik Makedonia dapat diredam. | 1. Adanya  persetujuan Yunani untuk mengikuti putusan Mahkamah Internasional. | 1. Yunani  diperkirakan tidak akan mengulangi pelanggaran di masa yang akan dating dan jika mengulanginya lagi akan  bertentangan dengan putusan yang telah dibuat dan tidak  menghormati putusan dan aturan Mahkamah Internasional.  (www.icj-cij.com) |

Berdasarkan verifikasi data di atas, dengan putusan *International Court of Justice* atau Mahkamah Internasional sebagai badan hukum tertinggi yang menangani kasus konflik Yunani dan Republik Makedonia, Mahkamah Internasional mampu membantu konflik antara Yunani dan Republik Makedonia.

# Skema dan Alur Penelitian

**Yunani**

**Mahkamah Internasional**

**Republik Makedonia/FYROM**

Republik Makedonia:

1. Yunani dinyatakan melanggar Pasal 11 ayat 1 tentang keikutsertaan Republik Makedonia dalam organisasi Internasional dalam perjanjian *Interim Accord*
2. Republik Makedonia dapat melanjutkan nama

konstitusionalnya dalam hubungannya dengan Yunani dan organisasi internasional.

konflik Yunani dan

dalam

Internasional

Mahkamah menangani

Meminimalisir dan meredam konflik Yunani dan Republik Makedonia.